

**ANALISIS SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN
BONDOWOSO TAHUN 2014-2017**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

ZAINUDIN
NIM. 083 144 030

Pembimbing:

Siti Masrohatin, S.E., MM
NIP. 19780612 200912 2 001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEPTEMBER 2018**

**ANALISIS SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN
BONDOWOSO TAHUN 2014-2017**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

Zainudin
NIM. 083 144 030

Disetujui Pembimbing



Siti Masrohatin, S.E.,MM
NIP. 19780612 200912 2 001

**ANALISIS SEKTOR PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN
BONDOWOSO TAHUN 2014-2017**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal : 13 September 2018

Tim penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Moch. Chotib, S.Ag, MM

NIP. 19710727 200212 1 003

Nikmatul Masruroh, M.E.I

NIP. 19820922 200901 2 005

Anggota:

1. Dr. Nurul Widyawati IR, S.Sos, M.Si

()

2. Siti Masrohatin, S.E.,MM

()

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Moch. Chotib, S.Ag, MM

NIP. 19710727 200212 1 003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

(QS.An-Nahl:90)¹

IAIN JEMBER

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak (Hamim / H. Faisol) Ibunda (Alm. Zahria) tercinta merupakan inspirasi utama dan yang selalu memberikan do'a serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku (Luluk Zahro) Adikku (Siti Sofiah) tersayang yang telah menjadi motivasi dan penyemangat dalam mencapai cita-cita dan impian.
3. Keluarga besarku yang selalu memberikan do'a dan dukungan.
4. Sahabat-sahabatku, Keluarga besar kelas K1 Ekonomi Syariah 2014, Keluarga sekaligus saudara (Muhammad Rizal Irfani, Rofi Hoirul Rozikin, Imam Mudhofir, Dian Atikur Rohman, Ike Kurnia Putri, Nailul Ilmiamaliyah, Asiawati, Ummi Riski Amalia) yang selalu memberikan support dan do'anya.
5. Almamaterku IAIN Jember yang selalu kubanggakan.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, proses penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman dengan ilmu pengetahuan serta ampunan dari Allah SWT.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyangk pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr.Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si selaku Dosen Pendamping Akademik dan Wakil Dekan II di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku ketua jurusan Ekonomi Islam.
5. Ibu Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku ketua program studi Ekonomi Syariah.
6. Ibu Siti Masrohatin, S.E.,MM. Selaku dosen pembimbing skripsi.
7. Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada kami.
8. Seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.

9. Teman-teman program studi ekonomi syariah kelas K-1 angkatan 2014 yang telah memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan proposal ini.

Semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu/saudara berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam pembahasan dan penulisan skripsi ini banyak kekurangan serta kelemahan dan masih jauh dari sempurna oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan skripsi ini.

Jember, 13 September 2018

Penulis



ABSTRAK

Zainudin, Siti Masrohatin. S.E.,MM 2018: Analisis Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017.

Sumber-sumber keuangan Daerah/Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur yang nyata. Pendapatan Asli Daerah (PAD)nya dapat memberikan sumbangan yang berarti kepada Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD), sumber utama pembangunan daerah harus dapat di biayai dari PAD, sehingga daerah tidak bergantung dari subsidi pemerintah pusat. Namun pada Kabupaten Bondowoso yang memiliki kekayaan yang potensial masih tidak mampu mencukupi keperluan daerahnya sendiri dan masih ketergantungan pada pemerintah pusat. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi PAD terhadap Anggaran APBD.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan bahwa. 1). Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017? 2). Apa kendala pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017? 3). Bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bondowoso tahun. 2). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017. 3). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kontribusi PAD Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bondowoso. Pengumpulan data menggunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan untuk pengujian keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini: 1). Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan PAD : menjalankan seluruh program yang telah ditetapkan serta menjalankan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak. 2). a. kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak serta minimnya pengetahuan masyarakat manfaat membayar pajak sehingga enggan untuk membayar pajak. b. Ketidakstabilan pendapatan redistribusi daerah . c. Terjadinya penurunan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah. 3). Kontribusi PAD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila perekonomian Kabupaten Bondowoso sudah baik maka segala kebutuhan tingkat kesejahteraan masyarakat akan lebih baik.

Kata kunci: sektor PAD, kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

Zainudin, Siti Masrohatin. S.E.,MM 2018: The analysis of Regional Original Revenue Sector (PAD) to improve Bondowoso Regency Public Welfare in 2014-2017 period .

Regional financial resources or Regional Income in regional finance is one of the real benchmarks. Regional Original Income (PAD) can provide a meaningful contribution to the Regional Expenditure Budget (APBD), the main source of regional development must be financed from the PAD, so that the region does not depend on central government subsidies. However, even Bondowoso has good potential of wealth, but it is still unable to fulfill its need and depend on the central government. This can be seen from the contribution of the PAD to the APBD Budget.

The research problems are: 1). What are the efforts made by the regional government in increasing Bondowoso Regency's Local Original Revenue (PAD) 2014-2017? 2). What are the government's constraints in increasing Bondowoso Regency's Original Regional Income (PAD) 2014-2017? 3). How does the contribution of Bondowoso Regency Local Original Income (PAD) 2014-2017 in improving the welfare of the community

The purposes of this research are: 1). To find out the efforts made by the government in increasing the PAD of Bondowoso Regency in the year. 2). To find out and describe the government's constraints in increasing Bondowoso Regency's Local Original Revenue (PAD) 2014-2017. 3). To find out and describe the contribution of PAD in Bondowoso District in improving community welfare.

The method of this research is a qualitative with descriptive method which was conducted at Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Bondowoso Regency. Data collection used are observation, interviews, documentation. For checking the validity of the data obtained, the researcher used the validity of the data with source triangulation techniques.

The results of this research are: 1). Efforts made by the government to increase PAD: carry out all programs that have been established and Tax Intensification and Extensification. 2). a lack of public awareness in paying taxes as well as the lack of knowledge of the community that benefits from paying taxes so that they are reluctant to pay taxes. b. The instability of regional retribution income. c. The occurrence of a decline in Other Legal Income. 3). PAD contribution in improving community welfare. PAD has a significant impact on economic growth. If the economy of Bondowoso Regency is good, then all the needs of the community will be better.

Keywords: PAD sector, people welfare.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	21
1. Otonomi Daerah	21

2. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	24
3. Pendapatan Asli Daerah	28
4. Analisis Potensi Pendapatan Asli Pajak	38
5. Penghitungan Potensi Pendapatan Asli daerah (PAD)	39
6. Kesejahteraan	39
BAB III :METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Subjek Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data	51
G. Tahap-tahap Penelitian	52
BAB IV :PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	56
A. Gambaran Objek Penelitian	56
1. Kabupaten Bondowoso.....	56
2. Badan Pendapatan Daerah.....	61
B. Penyajian Data dan Analisis.....	65
1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2017	65
2. Kendala pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso	67

3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014- 2017 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	70
C. Pembahasan Temuan.....	72
1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2017	72
2. Kendala pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso	73
3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014- 2017 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.....	74
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran – saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Kontribusi PAD Terhadap APBD di Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017(miliar).....	5
Tabel 2.1	Mapping Penelitian	20



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Bondowoso	59
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2. Matrix Penelitian

Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian

Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5. Pedoman Wawancara

Lampiran 6. Jurnal Penelitian

Lampiran 7. Denah Lokasi Penelitian

Lampiran 8. Foto Dokumentasi Penelitian

Lampiran 9. Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama hampir setengah abad, perhatian utama masyarakat dunia tertuju pada cara-cara untuk mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. Para ekonom dan politisi dari semua negara, baik negara-negara kaya maupun negara miskin, yang menganut sistem kapitalis, sosialis maupun campuran, semuanya sangat mendambakan menomersatukan pertumbuhan ekonomi. Pada setiap akhir tahun masing-masing negara selalu mengumpulkan data-data statistiknya yang berkenaan dengan tingkat pertumbuhan *Gross National Product* (GNP) relatifnya, dan dengan penuh harap mereka menantikan munculnya angka-angka pertumbuhan yang membesarkan hati, pengejaran pertumbuhan merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia. Seperti yang kita ketahui, berhasil tidaknya program-program pembangunan di negara-negara dunia sering dinilai berdasarkan tinggi-rendahnya tingkat output dan pendapatan nasional.

Perekonomian dunia pada abad ke-21 adalah globalisasi dan perdagangan bebas untuk menghadapi hal ini wawasan pembangunan harus mengarah kepada kemandirian atas efisiensi.² Pembangunan ekonomi merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pendapatan. pembangunan ekonomi maupun pembangunan dibidang-bidang lainnya selalu

² Aburizal Bakrie, Muchtarmandala, *Pembangunan Ekonomi Nasional Suatu Pendekatan Pemerataan, ke Adilan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta, PT Intermasa: 1997),205.

melibatkan sumberdaya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan, pembangunan ekonomi tidak terlepas dari berbagai macam kegiatan ekonomi pada suatu negara yang dapat digolongkan menjadi sektor primer, sekunder dan tersier. Indonesia yang termasuk negara berkembang pada mulanya terpusat pada sektor pertanian namun seiring berkembang teknologi dan ilmu pengetahuan peranan sektor pertanian semakin berkurang dan digantikan oleh sektor industri dan jasa. Sektor industri merupakan sektor yang memegang peranan penting terhadap perekonomian dalam jangka panjang, dan pada abad 21 munculnya yang otonomi daerah, yang menunjang aspek perekonomian di berbagai negara.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, Indonesia dikenal negara yang memiliki berbagai macam suku dan budaya, akan tetapi negara ini tetap negara kesatuan, walaupun memiliki berbagai macam suku dan budaya Indonesia tetap negara kesatuan, yang biasa dikenal dengan istilah Bhineka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda namun tetap satu, dimana didalamnya dikenal adanya berbagai macam daerah, dan daerah-daerah itu sendiri adalah daerah otonom, otonomi daerah (Otonomi) diartikan sebagai pemberi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (kabupaten atau kota) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat,³ dengan bertujuan memberikan pelayanan dan kesejahteraan rakyat.

³ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 235

Sebagai konsekwensi yang dianutnya asas desentralisasi sesuai dengan ketentuan UU No.12 Tahun 2008 maka Ada (dua) tingkatan daerah otonom, (yaitu negara yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri), yang dibagi menjadi daerah tingkat I (provinsi) dan daerah tingkat II (kabupaten/kota).

Sejalan dengan UU No.12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang *perimbangan keuangan anatara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*. Serta UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Dimana pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun kota telah diberikan wewenang untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri melalui otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian disuatu daerah tersebut, dimana otonomi daerah mensyaratkan adanya kemandirian dibidang pembiayaan/keuangan. Keuangan ini penting karena tidak ada suatu kegiatan pemerintah pun yang tidak membutuhkan biaya. Keuangan merupakan salah satu sumber kehidupannya daerah otonom tanpa ditunjang kemampuan keuangan akan lemah sekali.

Menurut pakar bidang keuangan, kunci keberhasilan penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah, atau kemandirian suatu daerah sumber-sumber keuangan daerah dapat diperoleh dari dana perimbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pinjaman dan bantuan lainnya.⁴

⁴ Rochman Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Bandung : Eresco, 2007), 87.

Sedangkan UU No.33 Tahun 2004. Sumber-sumber pendapatan daerah antara lain:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil restribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam otonomi daerah sumber-sumber keuangan daerah/Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Pada umumnya daerah dikatakan siap untuk melaksanakan otonomi daerah apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya dapat memberikan sumbangan yang berarti kepada Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD), sumber utama pembangunan daerah harus dapat dibiayai dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga daerah tidak bergantung dari subsidi pemerintah pusat. Dengan demikian daerah dapat dengan leluasa melakukan akselerasi pembangunan daerahnya dalam tujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada suatu daerah tersebut dengan tanpa pengaruh dari pemerintah pusat.⁵

Sebagai konsekwensinya menjalankan otonomi daerah yang mulai pada Tahun 2001 pemerintah Kabupaten Bondowoso berupaya untuk terus meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di

⁵ Ibid.88

Kabupaten Bondowoso meliputi, hasil pajak daerah, redistribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Kabupaten Bondowoso adalah daerah yang memiliki kekayaan alam yang cukup bagus dan alami, terutama dalam sektor unggulannya, yakni sektor pertanian dan perkebunan, tingkat kekayaan alam yang dimiliki oleh kabupaten ini sangatlah potensial apabila dapat dikelola dengan baik, namun dengan kekayaan alam yang potensial Kabupaten Bondowoso masih tidak mampu mencukupi keperluan daerahnya sendiri, masih terbilang miskin dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat masih lumayan tinggi. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Kontribusi PAD Terhadap APBD di Kabupaten Bondowoso
Tahun 2014-2017(miliar)⁶

TAHUN	APBD	PAD	KONTRIBUSI(%)
2014	2.750,591	137,684	4,98
2015	2.944,255	158,974	5,37
2016	3.154,789	177,025	5,61
2017	3.382,313	229,151	6,77
Rata-rata			5,68

Sumber : DJPK Kementerian Keuangan

⁶ www.djpk.kemkeu.go.id, diakses pada 09 April 2018, 10.30

Pada tabel di atas adalah nilai keseluruhan dari berbagai sektor PAD pertahunnya di Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2014 sebesar 137,684 , dan pada tabel di atas bisa diketahui bahwasanya dari Tahun 2014 -2017 yang diperoleh Kabupaten Bondowoso setiap tahunnya memang relatif mengalami peningkatan, akan tetapi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut apabila dihitung dari nilai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) sangatlah kecil dan pertahunnya mengalami naik turun, apabila dihitung rata-rata kontribusi dari Tahun 2014-2017 sebesar 5,68% , angka ini relatif kecil untuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan yang diketahui bahwasanya Kabupaten Bondowoso memiliki kekayaan alam yang sangat mumpuni, sedangkan hasil yang diperoleh masih sangat kecil. dan Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat masih sangat tinggi sebesar 94,32%. Kekayaan alam yang cukup baik, dengan Pendapatan Asli Daerah yang demikian Kabupaten Bondowoso tingkat kemandiriannya masih kurang baik, yang menjadi pertanyaan besar pada Kabupaten Bondowoso ini, bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso apabila Pendapatan Asli Daerahnya masih kurang baik, dan upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Bondowoso.⁷

Berdasarkan uraian peneliti ingin mengetahui apa saja sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

⁷ www.djpk.kemnkeu.go.id. diakses pada 09 April 2018, 10.30

Kabupaten Bondowoso, serta bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap kesejahteraan Kabupaten Bondowoso.. untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. maka peneliti mengambil judul ***“Analisis Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017”***

B. Fokus Penelitian

Fokus masalah penelitian menentukan permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian.⁸

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, dapat ditemukan fokus penelitian yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017?
2. Apa kendala pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017 ?
3. Bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan keinginan-keinginan peneliti atas hasil penelitian dengan indikator-indikator apa yang hendak ditemukan dalam

⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 20014), 111.

penelitian, terutama yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian.⁹

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso tahun 2014-2017.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso tahun 2014-2017 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif manfaat penelitian lebih bersifat teoritis yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah bila peneliti menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan dan mengendalikan suatu gejala.¹⁰

⁹ Riduan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk guru, Karyawan dan Peneliti Pemula* (Bandung:ALFABETA, 2010), 6.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&B*. (Bandung: Alfabeta, 2010)291.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai kontribusi guna menambah wawasan ilmu pengetahuan dan informasi bagi dunia pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama islam pada khususnya guna perkembangan dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti. Sebagai langkah awal untuk mengasah kemampuan dalam melakukan kajian ilmiah sehingga dapat menambah wawasan dan pengalaman yang berharga.
- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Jember. Penelitian ini sangat berguna terutama untuk pengembangan ilmu, dan sebagai referensi kepustakaan terkait dengan analisis sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memberikan sumbangsuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso tahun 2014-2017.
- c. Bagi tempat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau tolak ukur bagi Pemkab Bondowoso mengenai kinerja pemerintahan guna untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri.
- d. Bagi Masyarakat Umum. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang kinerja pemerintah daerah dan pengelolaan pendapatan aset milik daerah

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak

terjadi kesalahfahaman dengan makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹¹

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan atau perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).¹²

2. Sektor

Sektor adalah unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat unit tersebut bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian¹³

Sektor ekonomi adalah pengelompokan ekonomi menjadi beberapa bagian. Secara tradisional, sektor ekonomi dibagi menurut aktifitas, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Pada abad ke-20, sektor kuartener ditambahkan sebagai kelompok baru. Selain menurut aktifitas, sektor ekonomi juga dapat dibagi menurut pelaku. Berdasarkan pengelompokan ini sektor ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu sektor publik, bisnis dan sosial.

¹¹ Babun Suharto, d.k.k, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Jember.IAIN Jember Press,2014)52

¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: bslsi pustaka, 2007),43

¹³ <https://kbbi.web.id> diakses pada 10 April 2018, 22:36

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan perundang-undangan sesuai dengan Otonomi Daerah.¹⁴

Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

a. Pajak Daerah

Pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.¹⁵

b. Restribusi Daerah

Restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha.¹⁶

c. Perusahaan Daerah

Sumber pendapatan asli daerah selanjutnya adalah perusahaan daerah dalam hal ini, laba perusahaan daerah yang di harapkan sebagai sumber pasukan bagi Daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

¹⁴ Undang-undang Otonomi Daerah, (Bandung: FOKUSMEDIA,2012),248

¹⁵ Marihot Pahala Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 5-8

¹⁶ Setu Setiawan, *Perpajakan Indonesia*, (Malang: UMM Press.2009),293

Pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah Daerah.

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam istilah umum, sejahtera menunjukkan terhadap keadaan yang baik kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.¹⁷ Hal itu adalah tujuan disetiap Daerah dalam. Seperti halnya Kabupaten Bondowoso apabila dilihat pada lima tahun terakhir Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan dalam pendapatan asli daerah disetiap tahunnya, meskipun peningkatan disetiap tahunnya tidak begitu tinggi. Hal ini akan mempengaruhi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karna apabila pendapatan asli daerahnya baik maka akan berpengaruh terhadap APBD yang di berikan oleh pemerintah pusat, apabila PAD dan APBD nya sudah semakin baik maka segala kebutuhan dan kepentingan Kabupaten Bondowoso akan semakin terpenuhi. Seperti halnya sarana prasaran, pembangunan jalan, lembaga pendidikan dan kesehatan serta perekonomian masyarakat akan lebih baik, maka kualitas masyarakat akan baik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso akan semakin baik.

¹⁷ <http://repository.uin-suska.ac.id/3990/3/BAB%20II.pdf>. Diakses 18 September, jam 13.28 WIB.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan dijelaskan alur pemikiran yang digunakan dalam menyusun skripsi ini, tujuan dari sistematika pembahasan ini adalah agar lebih mudah dipelajari dan dipahami oleh pembaca.

Bab I : Pendahuluan pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Kepustakaan, pada bab ini akan dipaparkan kerangka pemikiran serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Dalam hal ini akan disajikan pembahasan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang meliputi kepemimpinan manajer dan prestasi kerja karyawan.

Bab III : Metode Penelitian, metode bagian ini membuat pembahasan tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Penyajian Data dan Analisis, dalam bab ini memuat pembahasan empiris tentang penyajian data dan analisis yang termasuk di dalamnya antara lain gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab V : Penutup, merupakan bab yang paling terakhir dalam pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang penelitian ini, baik untuk penelaahan lebih jauh maka perlu adanya refrensi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), refrensi yang dimaksud akan dijelaskan:

1. Afthon Ilham Mubarak mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN JEMBER) 2017, Dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2012-2016”. Fokus penelitian: 1. bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan yang diukur dengan rasio keuangan. 2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang ditinjau dari pandangan Islam . penelitian ini menggunakan metode penelitian: Deskriptif Kualitatif. Adapun hasil penelitiannya: menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bondowoso terlihat pada rasio kemandirian yang sangat rendah. 2. Rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun.¹⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan pada penelitian sekarang adalah jenis penelitiannya sama, yaitu menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang

¹⁸ Afthon Ilham Mubarak, “Analisi Kinerja Keuangan Daerah Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bondowoso tahun 2012-2016”, (jember: IAIN Jember,2017).

pendapatan daerah yang bertujuan dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Perbedaan Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap kinerja keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang lebih memfokuskan terhadap kontribusi PAD terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian terdahulu berlangsung dari tahun 2012-2016, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang adalah tahun 2014-2017 dan tidak menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah.

2. Yulis Khairuniawati mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN JEMBER) 2017, Dengan judul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perolehan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Umbulsari.”¹⁹ Fokus penelitian: 1. bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan perolehan pajak bumi dan bangunan di Desa Umbulsari 2. Faktor penghambat apa saja yang dihadapi pemerintah desa dalam meningkatkan perolehan pajak bumi dan bangunan di Desa Umbulsari. 3. Usaha apa yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi faktor penghambat dalam meningkatkan perolehan pajak bumi dan bangunan di Desa Umbulsari. Metode penelitian: Deskriptif Kualitatif. Adapun hasil penelitiannya 1.) peranan pemerintah desa dalam meningkatkan perolehan pajak bumi dan bangunan desa umbulsari. Fungsi dari pemerintah desa sendiri adalah sebagai motivator untuk bawahannya dengan memberikan peran aktif dalam memberi motivasi, penyuluhan

¹⁹ Yulis kharuniawati, “peranan pemerintahan Desa dalam meningkatkan perolehan pajak bumi dan bangunan di Desa Umbulsari”, (Jember: IAIN Jember,2017).

serta pelayanan secara langsung pada masyarakat. 2.) kendala yang dihadapi pemerintah desa adalah pertama dari sisi penyuluhan yang masih banyak warga desa yang masih enggan untuk hadir dalam kegiatan penyuluhan. Kedua adanya kesalahan teknis saat pembagian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepemilikan ganda sehingga diperlukan pembaharuan pendataan. 3.) upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan perolehan pajak bumi dan bangunan, ialah dengan cara melakukan penyuluhan tentang wajib pajak, memberikan pelayanan terbaik bagi warga dan memberikan sanksi yang tegas kepada warga yang melewati batas pembayaran pajak yang sudah ditentukan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan pada penelitian sekarang adalah jenis penelitiannya sama, yaitu menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang pendapatan daerah yang bertujuan dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah pada penelitian terdahulu tidak terdapat indikator redistribusi daerah, perusahaan daerah, dan pendapatan lain yang sah dan lebih fokus pada pajak bumi bangunan saja.

3. Ahmad Misbakhul Munir mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN JEMBER) 2017, Dengan judul “Strategi Pembangunan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.”

Fokus masalah: 1. Bagaimana strategi pengembangan pariwisata di kabupaten jember 2. Bagaimana kontribusi pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Metode penelitian: Deskriptif Kualitatif. Adapun hasil penelitiannya 1. Dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember sebagai berikut: melakukan koordinasi dengan pelaku usaha pariwisata, melakukan pengembangan destinasi pariwisata, melakukan pemasaran pariwisata melakukan kerja sama dengan lembaga pariwisata. 2. Kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, restribusi khusus tempat parkir, restribusi tempat penginapan atau pesanggrahan, restribusi tempat rekreasi dan olahraga.²⁰

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan pada penelitian sekarang adalah jenis penelitiannya sama, yaitu menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang pendapatan daerah yang bertujuan dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah peneliti terdahulu lebih fokus pada bidang pariwisata dan pendapatan dari Dinas Pariwisata.

4. Muhammad Fauzi, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN JEMBER). 2016 Dengan judul “Kontribusi Restribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso

²⁰ Misbahul Munir, “Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember”, (Jember: IAIN Jember, 2017).

(Perspektif Ekonomi Islam)”. Fokus penelitian: 1. Bagaimana mekanisme Restribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso. 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penarikan Restribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bondowoso 3. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap Restribusi pasar di Kabupaten Bondowoso. Metode penelitian: Deskriptif Kualitatif. Adapun hasil penelitian ini: 1. Restribusi pasar di daerah bondowoso berkontribusi sebagai sumber pendapatan daerah, karena restribusi pasar merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup besar, dibandingkan retribusi lainnya seperti retribusi pariwisata. Di pasar tradisional Bondowoso yang dikelola oleh pemerintah daerah, pemungutan dilakukan petugas pasar setiap hari. Para petugas penarik retribusi pasar tersebut mendatangi para pedagang yang ada di pasar tersebut, para pedagang tidak perlu repot untuk mendatangi kantor pasar untuk membayar retribusi. 2. Faktor pendukung penarikan retribusi pasar adalah yang pertama pastinya faktor Sumber Daya Manusia (SDM) petugas itu sendiri, faktor pendukung lainnya yaitu sarana dan prasarana di pasar tersebut. 3. Apabila di tinjau dari pandangan ekonomi Islam retribusi Pendapatan Asli Daerah selama ini berjalan dengan baik.²¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan pada penelitian sekarang adalah jenis penelitian sama-sama membahas peningkatan pendapatan asli daerah.

²¹ Muhammad Fauzi, “Kontribusi Restribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bondowoso”, (Jember: IAIN Jember, 2016).

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah peneliti terdahulu lebih fokus pada Restribusi dan tidak menganalisis PAD lainnya. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dan peneliti sekarang menggunakan metode kualitatif.

5. Rahmasari mahasiswa Universitas Islam Blitar (UNISBA). 2015. dengan judul “Analisis Kontribusi Restribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar”. Fokus penelitian: 1. Bagaimana mekanisme Restribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar. 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penarikan Restribusi pasar dalam meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar. Metode penelitian: Deskriptif Kualitatif. Adapun hasil penelitian ini 1. bahwa sistem penerimaan restribusi pasar menggunakan *official assesment*, yaitu pemungutan langsung menggunakan benda berharga atau karcis yang merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar 2. dilaksanakn sepenuhnya oleh subdinas pasar. Pelaksanaan Restribusi Pasar pada tiga tahun terakhir berjalan cukup baik, sedangkan kontribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar rata-rata sebesar 17,19%.²²

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah penelitian tersebut sama-sama membahas tentang PAD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

²² Rahmasari, “Analisis Kontribusi Restribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar”, (Blitar:Universitas Islam Blitar,2015).

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah peneliti terdahulu lebih fokus pada Restribusi. Adapun perbedaan lainnya yaitu, penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dan peneliti sekarang menggunakan metode kualitatif.

Dari penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan beberapa persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Mapping Penelitian

No	Nama / Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Afthon Ilham Mubarak / Analisi Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bondowoso Tahun 2012-2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif. 2. Sama-sama membahas tentang PAD dan sama-sama fokus dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap kinerja keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang lebih memfokuskan terhadap kontribusi PAD terhadap kesejahteraan masyarakat. 2. Penelitian terdahulu berlangsung dari tahun 2012-2016, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang adalah tahun 2014-2017. 3. Tidak menggunakan Rasio kemandirian keuangan daerah.
2	Yulis kharuniawati / peranan pemerintahan Desa dalam meningkatkan perolehan pajak bumi dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. 2. Sama-sama membahas tentang PAD dan sama-sama fokus dalam meningkatkan Pendapatan Asli 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada penelitian ini tidak terdapat indikator restribusi daerah, perusahaan daerah, dan pendapatan lain yang sah. 2. Penelitian ini juga

	bangunan di Desa Umbulsari	Daerah.	fokus pada pajak bumi bangunan saja.
3	Misbahul Munir / Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode kualitatif 2. Sama-sama membahas tentang PAD dan sama-sama fokus dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih khusus pada bidang pariwisata dan pendapatan dari Dinas Pariwisata.
4	Muhammad Fauzi / Kontribusi Restribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bondowoso.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas tentang PAD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini fokus pada Restribusi dan tidak menganalisis PAD lainnya. 2. Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan metode kuantitatif.
5	Rahmasari Analisis Kontribusi Restribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas tentang PAD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian ini lebih fokus pada Restribusi. 2. Metode penelitian yang dipakai adalah menggunakan metode kuantitatif.

Sumber: Data diolah

B. Kajian Teori

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *namos*. *Autos* berarti sendiri dan

namos berarti aturan atau undang-undang sehingga dapat diartikan kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.²³

Tujuan otonomi daerah menurut Smith (1985) dalam Analisa *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari kepentingan Pemerintah Pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokrasi sistem pemerintah daerah. Sementara, bila dilihat dari sisi kepentingan Pemerintah Daerah ada tiga tujuan yaitu :

- a. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan lebih membuka kesempatan untuk masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam berbagai aktifitas politik ditingkat total atau daerah.
- b. Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
- c. Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah

²³ <http://www.go.id/33.pdf&ved.diakses:03-April-2018,14:38>.

yang muncul sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan social dan ekonomi daerah.

Jika dilihat dari tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diharapkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan perakasa dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.²⁴ Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. dengan demikian tujuan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan dengan penerapan otonomi daerah secara luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta menjaga keseimbangan fiskal secara nasional.²⁵

Nyata berarti pemberian otonomi pada daerah dilaksanakan pada factor-faktor, penghitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan dinamis didasarkan pada kondisi dan perkembangan pembangunan dan bertanggung jawab adalah pemberian otonomi yang

²⁴ Anggota IKAPI, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, (Bandung: Fokusmedia, 2012), hal 408

²⁵ Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002),6.

diupayakan untuk memperlancar pembangunan dipelosok tanah air. Uraian diatas merupakan tujuan ideal dari otonomi daerah, pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi daerah, terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintah daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Krisis multidimensial yang tengah melanda bangsa Indonesia telah menyadarkan kepada kita akan pentingnya menggagas kembali konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam arti yang sebenarnya. Gagasan penataan kembali sistem otonomi daerah bertolak dari pemikiran untuk menjamin terjadinya efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi nilai nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerinthan Daerah.

Selama orde baru, harapan uang besar dari pemerintah Daerah untuk dapat membangun daerah yang berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ketahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. Yang terjadi adalah ketergantungan fiscal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).²⁶

²⁶ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta : Andioffset, 2002), 95.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dan dikelola di APBD. Pencatatan dan pengelolaan tersebut masuk di catat dan dikelola dalam perubahan dan penghitungan.

Karena dalam penerimaan dan pengelolaan keuangan Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Hal ini untuk menjamin bahwa semua penerimaan dan pengeluaran yang dikelola Gubernur atau Bupati/Wakil kota dengan perangkatnya digolongkan dalam pelaksanaan Desentralisasi atau dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi atau dalam eangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Sebagai contoh misalnya pungutan Puskesmas merupakan penerimaan dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dan diadministrasikan dalam APBD.

APBD, perubahan APBD, dan penghitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah, APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBN ditetapkan. Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran, sedangkan Perhitungan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Pokok-pokok muatan Peraturan Daerah tersebut, antara lain, kerangka dan garis besar prosedur penyusunan APBD,

kewenangan keuangan Kepala Daerah dan DPRD pengadaan barang dan jasa, prosedur melakukan pinjaman, dan pertanggung jawaban keuangan.

Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah diatur dengan keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah.²⁷ Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah meliputi, antara lain, struktur organisasi, dokumentasi, dan prosedur terperinci dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, yang bertujuan untuk mengoptimalkan efektifitas, efisiensi, dan keamanan. Selain itu, sistem dan prosedur tersebut harus dapat menyediakan informasi kepada Pemerintah pusat secara akurat dan tepat pada waktunya.

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional, dari paradigma nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal, *pertama* otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman diintegrasikan bangsa,

²⁷ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2002), 232-234

kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. *kedua*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah.

Menurut Maryati terkait PAD dan PDRB, dinyatakan bahwa hasil analisis elastisitas PAD terhadap PDRB dapat mencerminkan pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah atau dana alokasi umum, maka meningkat pula penerimaan PDRBnya.²⁸

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga bidang analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Ketiga aspek tersebut meliputi :

- a. Analisis Penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
- b. Analisis Pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan factor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.

²⁸ Maryati, *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat*. (Padang:UNP, 2010).

- c. Analisis Anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang di proyeksikan untuk masa depan.²⁹

Hasil analisis pendapatan dan pengeluaran merupakan komponen dalam menganalisis keuangan daerah. Jika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, akan terjadi surplus anggaran dan jika pengeluaran lebih besar dari pendapatan akan terjadi defisit anggaran. Dalam hal ini perlu di perhatikan bagaimana kondisi keuangan yang ada pada Taun sekarang dan kecenderungannya untuk masa yang akan datang, sehingga pola surplus dan defisit anggaran dapat di prekdisikan. Stabilitas anggaran dari tahun ke tahun juga perlu diperhatikan.

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, pendapatan daerah sendiri atas PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.³⁰

PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan³¹. Sampai saat ini, sumber – sumber pendapatan asli Daerah adalah:

- a. Hasil pajak Daerah
- b. Hasil restribusi Daerah
- c. Hasil perusahaan Daerah dan pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan

²⁹ Ibid., 96.

³⁰ Sugianto, *Pajak dan Restribusi Daerah*, (Jakarta:Grasindo,2008),63.

³¹ Abd. Rochim, *Barometer Keuangan Negara/Daerah*, (Yogyakarta:CV. Andi Offset, 2005),93.

d. Lain-lain hasil usaha yang sah

Dari beberapa unsur tersebut unsur tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan unsur andalan dalam PAD:³²

1) Pajak Daerah

a) Pengertian Pajak Daerah

Banyak ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak, namun pada intinya mempunyai makna yang sama. Definisi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³³. Selain itu, Pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perlunya pemungutan pajak pada suatu negara, sangat erat kaitannya dengan fungsi pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara.³⁴ Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang tanpa jasa timbal atau kontrasepsi dari negara yang secara langsung

³² Hassel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta:Grasindo, 2007), 146.

³³ Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 27.

³⁴ Marihot Pahala Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 5-8.

dapat ditunjuk, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas³⁵.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara dalam bentuk uang dengan tarif tertentu yang telah ditetapkan, bersifat mengikat dan memaksa dengan tujuan untuk membiayai kepentingan umum (negara) namun tidak ada imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.

b) Jenis-jenis Pajak Daerah³⁶

Dalam literatur pajak dan *public finance*, pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, wewenang, sifat dan lain sebagainya. Adapun pajak yang dipungut oleh tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari:

- (1) Pajak Hotel
- (2) Pajak Restoran
- (3) Pajak Hiburan
- (4) Pajak Reklame
- (5) Pajak penerangan Jalan
- (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

2) Restribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah Restribusi Daerah. Pengertian restribusi secara umum adalah pembayaran-

³⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: ANDI, 2013), 1.

³⁶ Kesit Bambang Prakoso, *Pajak dan Restribusi daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal 3

pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan, iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan tersebut bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, maka tidak dikenakan iuran tersebut.

Dari pendapat-pendapat di atas terlihat bahwa ciri-ciri mendasar dari retribusi adalah :

- a) Restribusi dipungut oleh Negara;
- b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
- c) Adanya prestasi yang secara langsung dapat di tunjuk;
- d) Restribusi dikenakan oleh setiap orang / badan yang menggunakan/mengenyam jasa jasa yang di siapkan Negara

Sedangkan pengertian distribusi daerah dapat di telusuri dari pendapat pendapat sebagai berikut ini: Panitia nasrun, merupakan distribusi Daerah sebagai berikut:

Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karna memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik Daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang di berikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.³⁷

³⁷Andrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Bogor, Ghalia Indonesia:2008), 57.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 ditegaskan bahwa pajak daerah dan distribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha.

Demikian pula, dari pendapat-pendapat dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok Restribusi Daerah sebagai berikut:

- a) Distribusi di pungut oleh Daerah;
- b) Dalam pungutan distribusi terdapat prestasi yang di berikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c) Restribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan Daerah.³⁸

Secara umum, keunggulan utama sektor distribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan distribusi berdasarkan pada *kontraprestasi*, dimana tidak di tentukan secara limitative seperti halnya sector pajak. Pembatas utama bagi sektor distribusi adalah terletak pada ada dan tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sebenarnya pemerintah daerah dapat saja mengusahakan distribusi selama ia dapat menyediakan jasa untuk itu.

Pemungutan restribusi daerah pada umumnya di lakukan oleh organisasi daerah yaitu dinas pendapatan daerah. Sekalipun faktor-faktor

³⁸ Setu Setiawan, *Perpajakan Indonesia*, (Malang: UMM Press.2009), 293.

yang mempengaruhi peningkatan pungutan distribusi tidak hanya terbatas dalam faktor-faktor internal dinas itu sendiri, tapi tidak diabaikan bahwa factor ini besar sekali pengaruhnya terhadap peningkatan pungutan distribusi di Daerah-daerah.

3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan.³⁹

Sumber Pendapatan Asli Daerah selanjutnya adalah perusahaan daerah dalam hal ini, laba perusahaan daerah yang di harapkan sebagai sumber pasukan bagi Daerah. Oleh sebab itu, dalam batas-batas tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat profesional. Dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi dalam penjelasan Umum UU Nomor 5/1974, pengertian perusahaan Daerah “sebagai suatu badan usaha yang dibentuk oleh Daerah untuk memperkembangkan perekonomian Daerah dan untuk menambah penghasilan Daerah”. Dari kutipan diatas tergambar dua fungsi pokok, yakni sebagai dinamisator perekonomian Daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan/stimulus bagi berkembangnya perekonomian Daerah dan sebagai penghasilan pendapatan Daerah. Ini berarti perusahaan Daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomis sehingga terjadi keuntungan yang dapat disetorkan ke kas daerah.

Landasan bagi pendirian perusahaan Daerah sampai saat ini masih tetap bertumpu pada UU Nomor 5 Tahun 1962. Sekalipun UU ini telah

³⁹ Ibid., 58.

dicabut melalui UU Nomor 6 Tahun 1969, tapi menurut pasal 2 UU No.6 Tahun 1969 pencabutan baru berlaku setelah UU penggantinya dikeluarkan dan hingga saat sekarang, Undang-Undang dimaksudkan sebelum dikeluarkan belum ada. Oleh karena itu, UU No. 5 Tahun 1962 masih tetap berlaku.

Pasal 5 UU No.5 Tahun 1962 menegaskan sifat Perusahaan Daerah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Daerah suatu kesatuan produksi yang bersifat:
 - a) Memberi jasa;
 - b) Menyelenggarakan kemanfaatan umum;
 - c) Memupuk pendapatan;
- 2) Tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut-serta melaksanakan pembangunan Daerah hususnya dan pembangunan ekonomi Nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan Daerah merupakan salah-satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan Daerah tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Atau dengan perkataan lain, perusahaan Daerah menjalankan

fungsi ganda yang harus tetap terjamin tetap keseimbangannya yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.⁴⁰

Walaupun demikian hal ini tidak berarti bahwa Perusahaan Daerah tidak dapat memberikan kontribusi maksimal bagi ketangguhan keuangan Daerah. Pemenuhan fungsi sosial oleh perusahaan Daerah dan keharusan untuk mendapatkan keuntungan yang memungkinkan perusahaan Daerah dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan Daerah, bukanlah dua pilihan dikhotomis yang saling bertolak-belakang. Artinya bahwa pemenuhan fungsi sosial perusahaan Daerah dapat berjalan seiring pemenuhan fungsi sosial Perusahaan Daerah dapat berjalan seiring dengan pemenuhan fungsi ekonominya sebagai badan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba/keuntungan. Hal ini dapat berjalan dapat apabila profesionalisme dalam pengelolaannya dapat diwujudkan.

Ada beberapa kemungkinan yang dapat menjelaskan lemahnya peranan Perusahaan Daerah dalam menompang pendapatan Daerah. Yang *pertama* berkaitan dengan pengelolaan perusahaan itu sendiri yang membutuhkan profesionalisme tersendiri dimana tenaga-tenaga untuk itu sangat terbatas dimiliki daerah-daerah. Dalam hal ini, perusahaan Daerah disamping mengembangkan misi ekonomi, yakni bagaimana memperoleh keuntungan (laba), juga yang sama pentingnya adalah mengemban misi sosial, yaitu bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sedikit banyak mengembangkan antara kedua hal ini merupakan pekerjaan

⁴⁰ Ibid., 60.

yang membutuhkan seni dan keahlian tersendiri yang tidak terlampau mudah.

Kesulitan yang ada ialah bahwa tenaga-tenaga yang dimiliki rata-rata tidak memiliki kualitas yang memadai yang diperlukan untuk maksud itu. Sekalipun data tentang tingkat pendidikan, keterampilan pengelola dan pengalaman peran pengelola Perusahaan Daerah tidak bisa penulis sajikan tapi dapat diperkirakan bahwa rata-ratanya masih berada di bawah berada di standar kebutuhan, kesimpulan ini terutama didasarkan pada pertimbangan bahwa pada tingkat aparatur Pemerintah Daerah pun kualifikasi pendidikan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki belum memadai seperti yang udah diuraikan.

Kedua, organisasi pengelolaanya kurang baik. Dalam hal ini Perusahaan-perusahaan yang ada, tidak memenuhi syarat-syarat dan kualitas yang diperlukan oleh organisasi bisnis umumnya. Hal ini menyebabkan terbengkalainya pertimbangan-pertimbangan efisiensi, efektivitas dan kepraktisan dan pengelolaan. Dan sebaliknya, mengalihkan pemborosan-pemborosan, salah urus, penyimpangan-penyimpangan yang secara umum merugikan Perusahaan Daerah itu sendiri. oleh sebab itu Perusahaan Daerah sulit berkembang dengan baik dan menghasilkan keuntungan bagi Daerah.

Ketiga kurangnya fasilitas atau alat yang dimiliki oleh Daerah dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan-perusahaan yang dimiliki.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah⁴¹

Pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah Daerah. Menurut Abdul Halim, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a) Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- f) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h) Pendapatan denda pajak
- i) Pendapatan denda retribusi
- j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k) Pendapatan dari pengembalian
- l) Fasilitas sosial dan umum
- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

⁴¹ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Akuntansi Keuangan Daerah), Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga :Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 98

4. Analisis Potensi Pendapatan Asli Pajak

Potensi Pendapatan Asli Daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibutuhkan pengetahuan tentang analisis keterangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan), dan yang tidak dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁴²

Beberapa variabel yang perlu di analisa untuk mengetahui potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah :

- a. Kondisi awal suatu daerah.
- b. Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah sangatlah menentukan.
- c. Peningkatan cakupan atau ekstentifikasi dan intensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- d. Perkembangan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) Per kapita Riil.
- e. Pertumbuhan penduduk.
- f. Tingkat Inflasi.
- g. Penyesuaian Tarif.

⁴² Ibid, 100

- h. Pembangunan Baru.
- i. Sumber Pendapatan Baru.
- j. Perubahan Peraturan.

5. Penghitungan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam menghitung potensi PAD dapat dilakukan dengan menganalisis secara makro dan mikro. Dari segi makro, bahwa pemerintah daerah merupakan salah satu pokok terpenting dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah. Sesuai dengan Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah Daerah diberi hak dan wewenang untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai kebutuhan dan potensi daerah. Dengan demikian pemerintah daerah harus berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar dengan demikian tingkat kemandirian keuangan semakin mantap.⁴³

6. Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran.

Pengertian sejahtera menurut W.J.S Poerwadarminta adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan

⁴³ Ibid.104

akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup.⁴⁴

Pengertian kesejahteraan adalah berasal dari kemampuan seseorang untuk berfungsi didalam masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan berasal dari terpenuhinya kebutuhan dasar yang bersifat materil dan non materil. Mulai dari aspek pengetahuan, kesehatan hingga kekayaan materi.

Menurut Mosher (1987), hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila

⁴⁴ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Sejahtera* (Jakarta: PT Aldi raya 1998), 84.

terjadi peningkatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga dapat merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera.

Menurut konsep lain, kesejahteraan bisa di ukur melalui dimensi moneter maupun non moneter, misalnya ketimpangan distribusi pendapatan, yang didasarkan pada perbedaan tingkat pendapatan penduduk di suatu daerah. Kemudian masalah kerentanan (*vulnerability*), yang merupakan suatu kondisi dimana peluang atau kondisi fisik suatu daerah yang membuat seseorang menjadi miskin atau menjadi lebih miskin pada masa yang akan datang. Hal ini merupakan masalah yang cukup serius karena bersifat struktural dan mendasar yang mengakibatkan risiko-risiko sosial ekonomi dan akan sangat sulit untuk memulihkan diri (*recover*). Kerentanan merupakan suatu dimensi kunci dimana perilaku individu dalam melakukan investasi, pola produksi, strategi penanggulangan dan persepsi mereka akan berubah dalam mencapai kesejahteraan.⁴⁵

Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk terhadap keadaan yang baik kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi

⁴⁵ Raharjo, *Transformasi Kesejahteraan*. (Jakarta: Alfabeta, 2002), 27

kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide Negara sejahtera. Di Amerika Serikat sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja.

Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:⁴⁶

- a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial.
- b. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- c. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.

Adapun indikator kesejahteraan diantaranya adalah:⁴⁷

- a. Jumlah dan pemerataan pendapatan.

Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan factor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja mutlak dilakukan

⁴⁶Ibid. 41

oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapat tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, mustahil manusia dapat mencapai kesejahteraan. Tanda-tanda masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan sebaran pendapatan yang mereka terima. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang pada akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang mereka terima.

b. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau.

Pengertian mudah disini dalam arti jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pendidikan yang mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan pendidikan yang murah dan mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-tingginya. Dengan pendidikan yang tinggi itu, kualitas sumberdaya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. Berkat kualitas sumber daya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sementara itu, sekolah juga mampu memberikan layanan pendidikan yang

sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Pendidikan disini, baik yang bersifat formal maupun non formal. Kedua jalur pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya.

c. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

Kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan dan pendidikan. Karena itu, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus sangat banyak. Masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Setiap saat mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Lagi-lagi, ini merupakan kewajiban pemerintah yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya.⁴⁸

⁴⁸ Sutoro Eko, *Kesejahteraan Rakyat Melalui Rute Desentralisasi*, (Jakarta: Prestasi Pusaka, 2006).137

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari titik temu antara apa yang tertuang dalam teori dengan realitas yang ada dilapangan, sehingga digunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan peneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dan perilaku yang diamati. Jadi dengan pendekatan ini peneliti dapat mendeskripsikan peran kepemimpinan manajer terhadap karyawannya.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti situs sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.⁴⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian dilakukan. Adapun lokasi penelitian ini: Jl. Khairil Anwar No 279, Badean. Kec. Bondowoso, Kabupaten Bondowoso. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Alasan memilih lokasi di Kabupaten Bondowoso ialah:

1. Apabila dilihat pada data Kontribusi PAD terhadap APBD. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso Masih sangat kecil

⁴⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2014), 43.

sedangkan dilihat dari geografi lahan pertanian Bondowoso memiliki lahan yang cukup baik untuk dikelola.

2. Kabupaten Bondowoso apabila dilihat tingkat perekonomiannya pendapatan masyarakatnya kabupaten bondowoso masih tertinggal dari kota lainnya. Bisa dilihat dari UMR kabupaten Bondowoso sebesar = Rp 1.667.035.77, Jember = Rp. 1.916983.99 Banyuwangi = Rp 1.881.680.41. dilihat dari tingkat UMR bisa dipastikan tingkat perekonomian dan kemajuan suatu daerah. jadi sangat menarik jika dilakukan sebuah penelitian mengenai upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Subyek Penelitian

Teknik *purposive* akan digunakan untuk menentukan subyek penelitian. *Purposive* adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.⁵⁰ Yang menjadi subyek penelitian di Kabupaten Bondowoso adalah. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bondowoso. Adapun informan yang akan diwawancarai:

1. Pimpinan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Bpk. Wiratmo Mulyanto.

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Bandung: alfabeta, 2014), 301.

2. Karyawan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Bpk. Heru sukamto dan Ibu. Susilowati.

D. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Teknik observasi data yang akan diteliti sebagai berikut: sumber pendapatan asli daerah beserta sektor-sektornya Tahun 2014-2014.

2. Wawancara

Merupakan wawancara yang dilakukan untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya di sesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden.⁵¹

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal

⁵¹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. (Bandung:Rosdakarya, 2006), 180.

dari informan yang lebih mendalam dan lebih mendalam dan jumlah informan sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.⁵²

Wawancara tidak terstruktur adalah yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dalam metode ini diperoleh tentang:

1. Kendala pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso
2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian namun melalui dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian,

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (bandung: alfabeta, 2016).137-140

sebagai pelengkap dari hasil wawancara. Setiap arsip, dokumen BAPENDA, dan foto.

Dokumentasi merupakan alat pengumpulan data secara otentik. Dalam metode ini akan diperoleh tentang:

- a. Gambaran umum tentang BAPENDA Kabupaten Bondowoso
- b. Sejarah berdirinya BAPENDA Kabupaten Bondowoso
- c. Struktur organisasi BAPENDA Kabupaten Bondowoso
- d. Program yang dijalankan pemerintah dalam meningkatkan PAD

E. Analisis Data

Pandangan Miles dan Hubberman mengenai analisis data kualitatif adalah Data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin dikumpulkan dengan aneka macam cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman, dan yang biasanya diproses kira-kira belum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas.

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus menerus selama proyek yang

berorientasi kualitatif berlangsung. Sebenarnya bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan, kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang mana yang dipilihnya. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi.

2. Penyajian data

Alur penting yang kedua dalam kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Beraneka penyajian kita temukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari alat pengukur bensin, surat kabar sampai komputer. Dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi.

Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Peneliti yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis.

Penarikan kesimpulan dalam pandangan kami hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin berupa pemikiran singkat kembali yang melintas dalam fikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.⁵³

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan dilapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan dengan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan, observasi secara lebih mendalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori), pembahsan oleh

⁵³ Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI-press, 1992), 15-17.

teman sejawat, analisis kasus lain, melacak kesesuaian hasil, dan pengecekan anggota (*member check*).⁵⁴

Adapun dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data yang bersumber dari informan yang berbeda dengan teknik yang sama.⁵⁵

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan yang hendak dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap Pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisi data.

Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan

Dalam tahap awal ini, terdapat enam langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

a. Menyusun Rancangan Penelitian

Penelitian ini awali dengan pengajuan judul, menyusun matrik penelitian yang kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan berlanjut pada penyusunan proposal hingga seminar proposal.

⁵⁴Babun Suharto d.d.k, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember:Stain Jember Press, 2013), 47.

⁵⁵Sugiyono, *metode penelitian kuanlitatif, kualitatif, dan R&D*. 274.

b. Memilih lapangan lokasi penelitian

Pemilihan lapangan penelitian diarahkan oleh teori substantif yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis kerja walaupun masih bersifat tentatif. Hipotesis kerja itu baru akan terumuskan secara tetap setelah dikonfirmasi dengan data yang muncul ketika peneliti sudah memasuki kancah latar penelitian

Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif; pergilah dan jajakilah lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan yang berada dilapangan. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya tenaga, perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi lapangan.

c. Mengurus Perizinan

Pertama-tama yang perlu diketahui oleh peneliti adalah siapa saja yang berkuasa dan berwenang dalam memberikan izin bagi pelaksanaan penelitian. Selain mengetahui siapa yang berwenang, segi lain yang perlu diperhatikan ialah persyaratan yang diperlukan, seperti surat tugas, surat izin instansi di atasnya, identitas diri, perlengkapan yang akan digunakan, dan lain sebagainya.

Syarat-syarat lainnya yang perlu dimiliki oleh peneliti adalah syarat pribadi peneliti sendiri, yaitu sikap terbuka, jujur, bersahabat, simpatik dan empatik, objektif dalam menghadapi konflik, tidak pandang bulu, berlaku adil dan sikap-sikap positif lainnya.

d. Menjajaki dan Menilai Keadaan Lapangan

Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti telah membaca terlebih dahulu dari kepustakaan atau mengetahuinya dari orang dalam mengenai situasi dan kondisi daerah tempat penelitian akan dilakukan.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjangkau. Agar peneliti dapat memperoleh informan yang benar-benar memenuhi persyaratan, seyogyanya ia menyelidiki motivasinya, dan apabila perlu menguji informasi yang diberikannya, apakah benar atau tidak.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Perlengkapan yang harus disiapkan oleh peneliti antara lain mencakup perlengkapan fisik, surat izin mengadakan penelitian, kontak dengan daerah yang menjadi latar penelitian, pengaturan perjalanan, terutama jika lapangan peneliti jauh letaknya, perlengkapan pribadi dan perlengkapan pendukung yang akan digunakan.

2. Tahap Pekerja Lapangan

Setelah menyelesaikan tahapan-tahapan pada tahap pra lapangan peneliti dapat mengawali dan memulai penelitian sesuai rancangan penelitian yang telah disusun sebelumnya, diantaranya:

- a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri.
- b. Memasuki lapangan
- c. Berperan serta dan mengumpulkan data dengan menggunakan metode yang telah disiapkan

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menganalisa data sesuai dengan tehnik analisi yang digunakan, yaitu analisis kualitatif deskriptif.⁵⁶ setelah semua data terkumpul, menganalisis keseluruhan data kemudian mendiskripsikan dalam bentuk sebuah laporan serta dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Laporan yang sudah selesai, siap dipertanggungjawabkan di depan penguji dan kemudian digandakan untuk diserahkan kepada pihak terkait.

⁵⁶ Basrowi, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), 84-92.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Kabupaten Bondowoso

a. Letak Geografis⁵⁷

Kabupaten Bondowoso, adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. kabupaten Bondowoso berada di persimpangan jalur dari Besuki dan Situbondo menuju Jember. Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang tidak memiliki wilayah laut (terkurung daratan) dan terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur.

Kabupaten Bondowoso dapat dibagi menjadi tiga wilayah: Wilayah barat merupakan pegunungan (bagian dari Pegunungan Iyang), bagian tengah berupa dataran tinggi dan bergelombang, sedang bagian timur berupa pegunungan (bagian dari Dataran Tinggi Ijen). Bondowoso merupakan satu-satunya kabupaten di daerah Tapal Kuda yang tidak memiliki garis pantai.

Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Dikenal dengan sebutan daerah tapal kuda. Ibukotanya adalah Bondowoso.

Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km² yang secara

⁵⁷ <http://ditjenpdt.kemendes.go.id/potensi/district/13-kabupaten-bondowoso>. di akses: 14:15 15 Mei 2018

geografis berada pada koordinat antara $113^{\circ}48'10''$ - $113^{\circ}48'26''$ BT dan $7^{\circ}50'10''$ - $7^{\circ}56'41''$ LS.

Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar $15,40^{\circ}\text{C}$ – $25,10^{\circ}\text{C}$, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.

Letak Kabupaten Bondowoso tidak berada pada daerah yang strategis. Meskipun berada di tengah, namun Kabupaten Bondowoso tidak dilalui jalan negara yang menghubungkan antar provinsi. Bondowoso juga tidak memiliki lautan. Ini yang menyebabkan Bondowoso sulit berkembang dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur.

Secara geografis, Kabupaten Bondowoso mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara : Kabupaten Situbondo.
- 2) Sebelah timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
- 3) Sebelah selatan : Kabupaten Jember
- 4) Sebelah barat : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo.

Kondisi dataran di Kabupaten Bondowoso terdiri atas pegunungan dan perbukitan seluas 44,4 %, 24,9 % berupa dataran tinggi dan dataran rendah 30,7 % dari luas wilayah keseluruhan. Kabupaten Bondowoso berada pada ketinggian antara 78-2.300 meter dpl, dengan rincian 3,27% berada pada ketinggian di bawah 100 m dpl, 49,11% berada pada ketinggian antara 100 – 500 m dpl, 19,75% pada ketinggian antara 500 – 1.000 m dpl dan 27,87% berada pada ketinggian di atas 1.000 m dpl.⁵⁸

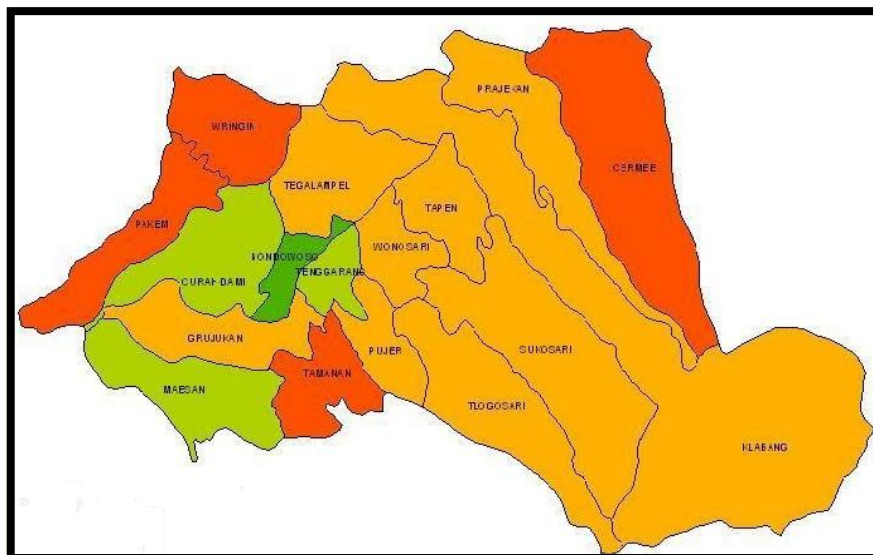
Menurut klasifikasi topografis wilayah, kelerengan Kabupaten Bondowoso bervariasi. Datar dengan kemiringan 0-2 % seluas 190,83 km², landai (3-15%) seluas 568,17 km², agak curam (16-40%) seluas 304,70 km² dan sangat curam di atas 40% seluas 496,40 km².

Berdasarkan tinjauan geologis di Kabupaten Bondowoso terdapat 5 jenis batuan, yaitu hasil gunung api kwarter 21,6%, hasil gunung api kwarter muda 62,8%, batuan lensit 5,6%, alluvium 8,5% dan miasem jasies sedimen 1,5%.

Untuk jenis tanahnya 96,9% bertekstur sedang yang meliputi lempung, lempung berdebu dan lempung liat berpasir; dan 3,1% bertekstur kasar yang meliputi pasir dan pasir berlempung. Berdasarkan tinjauan geologi, topografi, jenis tanah dan pola pemanfaatan lahan, wilayah Kabupaten Bondowoso memiliki karakteristik sebagai kawasan rawan terhadap terjadinya bencana alam, khususnya banjir dan longsor.

⁵⁸ <http://ditjenpdt.kemendes.go.id/potensi/district/13-kabupaten-bondowoso>. di akses: 14:15 15 Mei 2018

Gambar 4.1
Peta Bondowoso



Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso

b. Penduduk⁵⁹

Kabupaten Bondowoso yang mulai dikenal oleh dunia dengan sebutan Kota Republik Kopi ini yang memiliki 23 Kecamatan dan 227 Desa dan jumlah penduduk sebanyak 765 094 jiwa, penduduk laki-laki yang berjumlah 372 603 jiwa dan 392 491 jiwa perempuan, Kabupaten Bondowoso termasuk Kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur, yang menempati urutan 13 paling rendah penduduknya.

c. Perekonomian

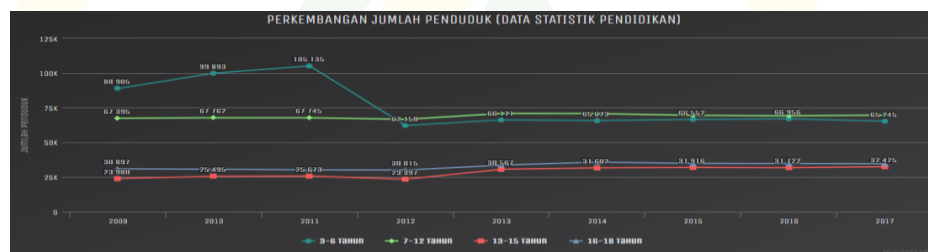
Perkembangan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Bondowoso dapat dilihat melalui beberapa indikator makro ekonomi. Rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung berdasarkan Atas Dasar Berlaku (ADHB) dari tahun ke tahun mengalami

⁵⁹ <https://jatim.bps.go.id>. Di akses 17-Mei-2018, 13:20

peningkatan apabila dilihat dari 2013-2016 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 besaran 11.792,60 Miliar, pada Tahun 2014 sebesar 13.075.10 Miliar dan pada tahun 2015 sebesar 14.485.60 Miliar dan pada tahun 2016 menjadi 15.858.50 Miliar. PDRB dari tahun 2013-2016 tidak pernah mengalami penurunan selalu mengalami peningkatan.

d. Pendidikan

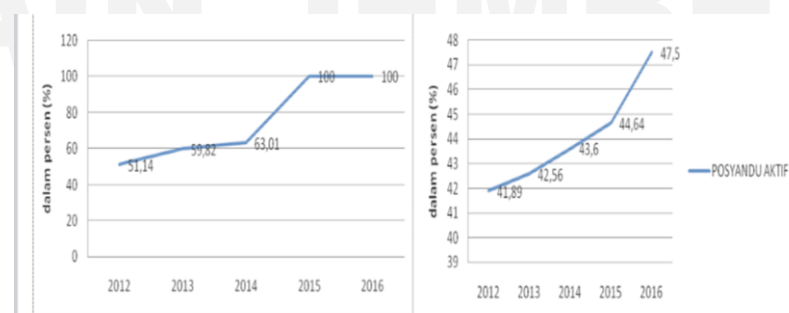
Perkembangan jumlah penduduk pada data statistik pendidikan



Sumber: kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan data statistik pendidikan diatas bahwasanya dengan perkembangan penduduk terhadap data statistic pendidikan setiap tahunnya mengalami perubahan bila dilihat lima tahun terakhir setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai 2017 bisa dikatakan semakin baik meskipun peningkatan tidak pernah tinggi. Namun pada lima tahun terakhir bisa dikatakan sukses.

e. Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)



Sumber: dinas kesehatan

Dilihat dari data Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) Kabupaten Bondowoso pelayanan kesehatan yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso terutama pada pemerataan kesehatan disebuah pedesaan yang selama ini dikembangkan seperti posyandu dan siaga desa apabila dilihat pada presentase lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang cukup baik. ini juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan yang lebih baik.

2. Badan Pendapatan Daerah

a. Sejarah⁶⁰

Dinas Pendapatan Daerah awal mulanya menjadi satu dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Melalui Perda no. 04 Tahun 2008 , Dan pada 2016 pemerintah daerah membelah menjadi dua yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) pelantikan Badan Pendapatan Daerah ini dilaksanakan pada 16 januari 2016 yang dipimpin oleh Drs.WIRATMO MULYONO, SPd, MSi sampai saat ini.

⁶⁰ Dokumentasi, BAPENDA Bondowoso.

b. Visi dan Misi

1) Visi :Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib adminitrasi dan pelayanan yang lebih baik didukung peran serta masyarakat

2) Misi :

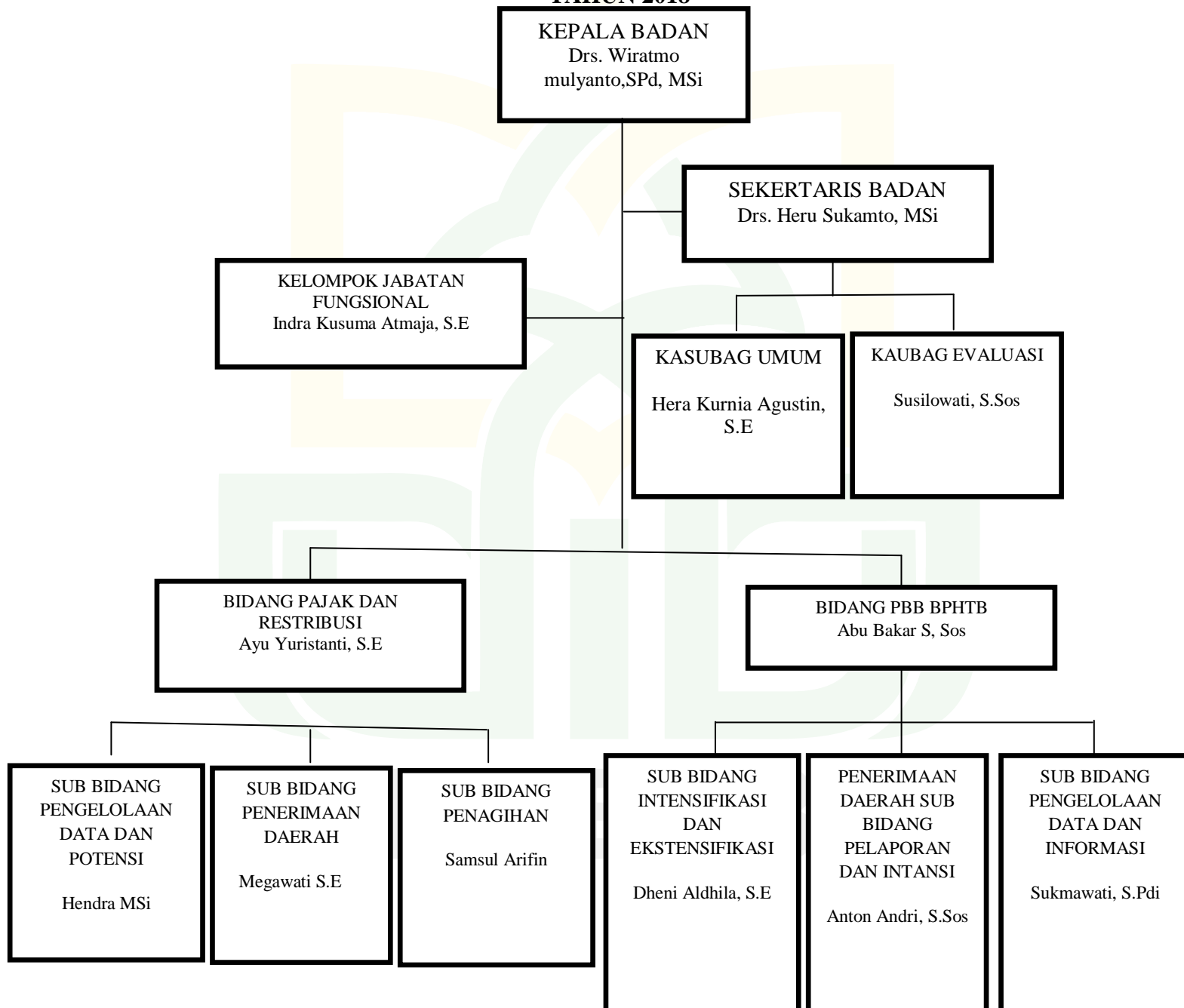
- a) mewujudkan kualitas kinerja sumber aparatur dan sumber informasi
- b) mewujudkan penerimaan pendapatan daerah intensifikasi dan ekstensifikasi
- c) mewujudkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan daerah
- d) mewujudkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak
- e) mewujudkan koordinasi pengendalian dan pengawasan

IAIN JEMBER

c. Struktur Organisasi

Gambar 4.2

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2018⁶¹**



⁶¹ Dokumentasi, BAPENDA Bondowoso.

d. Tugas dan fungsi

1) Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Bondowoso Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja badan pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso, menyebutkan bahwa badan pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso, menyebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di Bidang pendapatan

2) Fungsi Organisasi

- a) Perumusan kebijakan dibidang pendapatan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan;
- c) Pelaksanaan pendapatan, penetapan dan penagihan pajak dan retribusi daerah;
- d) Pelaksanaan dan pengorganisasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan daerah;
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

B. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017

Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yang memiliki wewenang mengatur laju aset daerah Kabupaten Bondowoso telah berbagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut ialah menjalankan program program yang sudah dibuat untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini juga diungkapkan oleh seorang Kepala Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso.

“untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bukan lah suatu hal yang mudah, namun itu adalah tugas kami dan tanggung jawab kami sebagai bagian pemerintah daerah yang sudah diberikan kepercayaan dalam mengurus aset Pendapatan Asli Daerah. dalam hal ini memerlukan suatu proses dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat, karna kesadaran masyarakat juga sangat membantu dan mendorong dalam meningkatkan kemajuan suatu daerah. Untuk saat ini program yang kami jalankan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu: 1 melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak 2. Meningkatkan sistem manajemen informasi pajak dalam rangka pelayanan prima dan transparansi pengelolaan pajak. Semisal akses pelayanan pajak menggunakan internet/mobile 3. Penagihan aktif piutang pajak daerah 4. Memberikan kesempatan seluas luasnya bagi aparatur untuk meningkatkan profesionalisme 5. Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dalam pelayanan pendapatan daerah 6. meningkatkan sarana prasarana kerja. 7. Membuat laporan-laporan yang transparan dan akuntabel.”⁶²

Selain itu juga diungkapkan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, yaitu:

⁶² Wiratmo Mulyanto, *wawancara*, Bondowoso, 14 Mei 2018

“berbagai upaya yang kami lakukan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, kami selaku kariawan kami berupaya melakukan program yang telah ditetapkan sebaik mungkin, lebih fokus pada program-program yang telah dibuat yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut, untuk program yang kami jalani saat ini salah satunya menjalankan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dalam peningkatan pendapatan daerah. Mengutamakan sebuah pelayanan prima pada masyarakat dalam pembayaran PBB, mempermudah suatu pelayanan pelayanan administrasi perkantoran dan beberapa program lainnya yang telah kami jalani.”⁶³

Hal ini juga diungkapkan oleh seorang Kasubag Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, yaitu:

“kami selaku pemerintahan Kabupaten Bondowoso yang sudah ditetapkan untuk mengatur Pendapatan Asli Daerah berbagai macam upaya yang telah kami jalankan untuk meningkatkan serta mengembangkan sebuah aset atau kekayaan Kabupaten Bondowoso . untuk saat ini kami lebih fokus pada program-program kami supaya lebih mudah dalam mencapai target kami dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Contohnya seperti meningkatkan suatu pelayanan kepada masyarakat dalam pembayaran PBB misalnya, di kabupaten Bondowoso terutama pada daerah pinggiran/pedesaan kami sudah meyalurkan aparatur desa untuk mendatangi setiap rumah yang mempunyai kewajiban membayar pajak untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini untuk menghindari kelalayan masyarakat desa dalam pembayaran PBB tersebut”⁶⁴

Beberapa program sudah dilakukan pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan aset daerah, program yang telah dijalankan saat ini ialah:

1. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
2. Meningkatkan sistem manajemen informasi pajak dalam rangka pelayanan prima dan transparansi pengelolaan pajak. Semisal akses pelayanan pajak menggunakan internet/mobile
3. Penagihan aktif piutang pajak daerah
- 4.

⁶³ Heru Sukamto, *wawancara*, Bondowoso, 16 Mei 2018

⁶⁴ Susilowati, *wawancara*, Bondowoso 18 Mei 2018

Memberikan kesempatan seluasluasnya bagi aparatur untuk meningkatkan profesionalisme 5. Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dalam pelayanan pendapatan daerah 6. meningkatkan sarana prasarana kerja. 7. Membuat laporan-laporan yang transparan dan akuntabel. Dan saat ini lebih fokus pada program yang kedua yaitu lebih fokus pada pelayanan prima yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran PBB di setiap wilayah/desa.

Dari berbagai macam program yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, semua itu bertujuan untuk meningkatkan aset yang dimiliki oleh Kabupaten Bondowoso, selain itu pemerintah menegaskan bahwasanya semua upaya yang dilakukan tidak bisa hanya melibatkan pemerintahan saja, pemerintah juga mengharapkan himbuan serta kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama dalam meningkatkan perekonomian yang berdampak pada aset daerah yang berdampak pada suatu kemandirian daerah yang pada akhirnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bondowoso.

2. Kendala Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso Serta Solusinya Tahun 2014-2017.

Dari segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah mengalami sebuah hambatan dan kendala dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini juga disampaikan oleh kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

“ada beberapa kendala dalam meningkatkan Pendapatan/Aset yang kita miliki, menurut saya hal ini sudah hal yang biasa, seperti halnya kita ingin sesuatu mas, dalam keinginan kita dalam mewujudkan suatu keinginan tersebut pasti kita harus melukan suatu usaha, pasti ada suatu yang menghambatnya, kita tidak bisa langsung menggapai keinginan dengan mudah pasti ada fase-fase yang harus kita lewati, sama dengan upaya yang kita lakukan dalam meningkatkan atau memperbaiki sebuah aset atau pendapatan yang kita miliki pasti dalam hal itu ada sebuah hambatan hambatan yang harus kita lewati bersama, untuk sejauh ini mulai sejak saya menjadi pimpinan disini yang hambatan atau kendala yang sering terjadi seperti :1. kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak serta minimnya pengetahuan masyarakat manfaat membayar pajak sehingga enggan untuk membayar pajak. 2. Ketidaksetabilan pendapatan redistribusi daerah . 3. Terjadinya penurunan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dan solusi dalam mengatasi kendala disini yang pertama melakukan edukasi tentang pentingnya pembayaran pajak. Yang kedua mendorong setiap dinas untuk meningkatkan pelayanan publik agar dapat melayani masyarakat secara efisien. Yang ketiga membuat kebijakan yang baik agar dapat menjaga kesetabilan pendatan serta meningkatkan pendapatan Lain-lain yang Sah”.⁶⁵

Hal ini juga diungkapkan oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, yaitu:

“kendala yang sangat rawan terjadi yaitu: ketidak setabilan dalam pendapatan hasil redistribusi daerah serta adanya penurun dalam pendapatan Lain-lain yang Sah. Solusi yang telah kami lakukan dalam menyetabilkan pendatan redistribusi daerah. Memperbaiki segala sarana prasarata yang dimiliki oleh daerah, dan yang dikelola oleh setiap intansi-intansi sesuai yang bertujuan untuk memenuhi sebuah keinginan setiap masyarakat supaya masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa pemerintah sehingga berdampak baik pada pendapatan redistribusi tersebut. Dan mencari penyebab-penyebab yang dapat menurunkan pendapatan Lain-lain yang Sah. Contohnya lebih memperketat dalam penarikan pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.”⁶⁶

⁶⁵ Wiratmo Mulyanto, *wawancara*, Bondowoso, 14 Mei 2018

⁶⁶ Heru Sukamto, *wawancara*, Bondowoso, 16 Mei 2018

Hal ini juga diungkapkan oleh seorang Kasubag Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, yaitu:

Kendala utama dalam peningkatan pendapatan asli daerah disini menurut saya bersumber pada satu titik utama yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak serta minimnya pengetahuan masyarakat manfaat membayar pajak sehingga enggan untuk membayar pajak. Solusi untuk mengatasi hal ini kami lebih kerap melakukan sebuah sosialisasi di setiap daerah mengenai dampak atau manfaat dalam pembayaran pajak yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat dalam pembayaran pajak.⁶⁷

Ada beberapa kendala yang dialami oleh pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu: 1. kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak serta minimnya pengetahuan masyarakat manfaat membayar pajak sehingga enggan untuk membayar pajak. 2. Ketidakstabilan pendapatan redistribusi daerah . 3. Terjadinya penurunan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dan solusi dalam mengatasi kendala disini yang pertama melakukan edukasi tentang pentingnya pembayaran pajak. Yang kedua mendorong setiap dinas untuk meningkatkan pelayanan publik agar dapat melayani masyarakat secara efisien. Yang ketiga membuat kebijakan yang baik agar dapat menjaga kestabilan pendatan serta meningkatkan pendapatan Lain-lain yang Sah

⁶⁷ Susilowati, wawancara, Bondowoso 18 Mei 2018

3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap kesejahteraan masyarakat mutlak dan nyata. Apabila Pendapatan Asli Daerah baik Kesejahteraan masyarakat semakin baik Hal ini juga dikatakan oleh kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso.

“kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari kemandirian suatu daerah, apabila suatu daerah telah benar-benar mandiri dalam arti sudah bisa mengatasi atau mencukupi kebutuhan daerahnya maka akan muncul suatu kesejahteraan yang akan dirasakan oleh masyarakatnya. Mengapa saya mengatakan seperti itu karena apabila daerah sudah mampu mandiri, sudah mencukupi kebutuhannya, seperti pembangunan jalan dan fasilitas lainnya maka kenyamanan dan kebutuhan masyarakat akan terpenuhi, dan suatu kemandirian itu bisa dilihat dari Pendapatan Asli Daerah jika Pendapatan Asli Daerah itu terus meningkat maka APBD yang akan datang akan lebih tinggi, oleh karena itu PAD sangat berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat. dan yang terjadi di Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2014-2017 PAD selalu mengalami peningkatan maka bisa dipastikan dari tahun ketahun kesejahteraan masyarakat Bondowosos akan lebih baik.”⁶⁸

Hal ini juga diungkapkan oleh Sekertaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, yaitu:

“Kami selaku instansi yang berwenang dalam mengatur sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus mewujudkan bagaimana aset daerah Kabupaten Bondowoso ini lebih dan meningkat dari tahun ketahun. Karena dampak dari peningkatan PAD tersebut sangatlah penting. Dari peningkatan PAD maka akan mendorong meningkatnya suatu Anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah (APBD) karena APBD sangat berdampak pada intensitasi pembangunan daerah yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. jadi kontribusi PAD untuk pembangunan daerah seperti fasilitas public, anggaran pendidikan dan lain-lain sangatlah berkontribusi.”⁶⁹

⁶⁸ Wiratmo Mulyanto, *wawancara*, Bondowoso, 14 Mei 2018

⁶⁹ Heru Sukamto, *wawancara*, Bondowoso, 16 Mei 2018

Hal ini juga disampaikan oleh seorang Kasubag Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso, yaitu:

“Kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah bisa diukur dari tingkat kemandirian suatu daerah, apabila suatu daerah itu sudah bisa mencukupi segala kebutuhan daerahnya dalam arti tidak memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat maka daerah tersebut sudah benar-benar mandiri dan kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut sudah pasti tinggi. Hal ini bisa dilihat dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah tolak ukur suatu kemandirian disuatu daerah. Dan bisa dipastikan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah sangat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Apabila Pendapatan Asli Daerah baik maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan semakin besar dan tingkat kesejahteraan suatu daerah tersebut akan lebih baik kembali, begitu pula di Kabupaten Bondowoso kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bonowoso dari tahun 2014 sampai 2017 terus mengalami peningkatan, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah semakin tahun semakin besar, oleh sebab itu pembangunan-pembangunan sudah bisa terus dilaksanakan sampai pelosok desa, penyediaan air bersih disetiap desa sudah mulai terlaksana, balai kesehatan sudah mulai tersedia dan banyak program-program lain yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Hal ini pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso.”⁷⁰

Pendapatan Asli Daerah berkontribusi atau berkaitan dengan kehidupan masyarakat daerah itu sendiri, lebih lebih pada perekonomian serta kesejahteraan masyarakat pada daerah itu sendiri. hal ini bisa dilihat pada setiap daerah, apabila disuatu daerah tersebut pendapatan asli daerahnya baik, sudah pasti perekonomian di daerah itu juga baik, dan apabila perekonomian suatu daerah tersebut baik maka akan timbul suatu kesejahteraan masyarakat yang baik, begitu pula pada Kabupaten Bondowoso menurut keterangan dari tiga nara sumber diatas menyatakan

⁷⁰ Susilowati, wawancara, Bondowoso 18 Mei 2018

bahwasanya pendapatan asli daerah sangat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah Kabupaten Bondowoso dari tahun ketahun mengalami sebuah peningkatan sudah pasti kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Termasuk yang terjadi pada Tahun 2014-2017, apabila pendapatan asli daerah itu semakin membaik maka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan membaik dan APBD akan berdampak pada intensitas pembangunan daerah, dan apabila pembangunan daerah sudah baik, maka bisa dipastikan jalannya perekonomian lebih kondusif membaik.

C. PEMBAHASAN TEMUAN

1. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 - 2017

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bondowoso Bpk. Wiratmo Mulyanto, sekretaris Bpk. Heru Sukanto dan Ibu. Susilowati sebagai kasubag umum dan kepegawaian. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu lebih fokus pada program yang telah kami tetapkan, adapun program-program yang telah ditetapkan yaitu:

- a. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
- b. Meningkatkan sistem manajemen informasi pajak dalam rangka pelayanan prima dan transparansi pengelolaan pajak. Semisal akses pelayanan pajak menggunakan internet/mobile.

- c. Penagihan aktif piutang pajak daerah.
- d. Memberikan kesempatan seluas luasnya bagi aparaturnya untuk meningkatkan profesionalisme.
- e. Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dalam pelayanan pendapatan daerah.
- f. Meningkatkan sarana prasarana kerja.
- g. Membuat laporan-laporan yang transparan dan akuntabel.

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso apabila dikaitkan dengan salah satu buku teori upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut sama dengan salah satu teori mengenai pemungutan pajak, penagihan piutang pajak, peningkatan prasarana pajak serta pembukuan laporan yang transparan dan akuntabel.⁷¹

2. Kendala Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso Serta Solusinya Tahun 2014-2017.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bondowoso Bpk. Wiratmo Mulyanto, sekretaris Bpk. Heru Sukanto dan Ibu. Susilowati sebagai kasubag umum dan kepegawaian menyampaikan bahwasanya kendala yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu: 1. kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak serta minimnya pengetahuan masyarakat manfaat membayar pajak sehingga enggan untuk membayar pajak. kendala yang

⁷¹ Kesit Bambang Prakoso, *Pajak dan Restribusi daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal 3

utama disini adalah kendala yang utama yang harus diselesaikan 2. Ketidakstabilan pendapatan redistribusi daerah . 3. Terjadinya penurunan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dan solusi dalam mengatasi hal ini ialah: Dan solusi dalam mengatasi kendala disini yang pertama melakukan edukasi tentang pentingnya pembayaran pajak. Yang kedua mendorong setiap dinas untuk meningkatkan pelayanan publik agar dapat melayani masyarakat secara efisien. Yang ketiga membuat kebijakan yang baik agar dapat menjaga kestabilan pendataan serta meningkatkan pendapatan Lain-lain yang Sah”.

Ada tiga kendala yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso kendala yang paling sering dominan terjadi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam wajib pajak.

3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014- 2017 dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bondowoso Bpk. Wiratmo Mulyanto, sekretaris Bpk. Heru Sukanto dan Ibu. Susilowati sebagai kasubag umum dan kepegawaian. Menyampaikan bahwasannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting terhadap kesejahteraan masyarakat, yang mana peningkatan PAD akan berdampak pada peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sedangkan peningkatan APBD berdampak terhadap intensitas pembangunan daerah, apabila pembangunan dalam suatu daerah itu baik, maka kebutuhan

masyarakat sarana prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat akan terpenuhi, seperti akses jalan, penyediaan sarana pendidikan, akses pelayanan kesehatan dan saluran penyediaan fasilitas umum yang akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat dan disitulah kesejahteraan masyarakat akan lebih baik.

Hasil temuan ini tidak jauh beda dengan temuan seorang peneliti dari salah satu Universitas di Padang Sumatera Barat. Hasil temuannya menyatakan bahwasannya: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dinyatakan bahwa hasil analisis elastisitas PAD terhadap PDRB dapat mencerminkan pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah atau dana alokasi umum, maka meningkat pula penerimaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)nya.⁷²

⁷² Maryati, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat". (Padang: UNP, 2010)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso: Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, Meningkatkan sistem manajemen informasi pajak dalam rangka pelayanan prima dan transparansi pengelolaan pajak, Penagihan aktif piutang pajak daerah, Memberikan kesempatan seluas luasnya bagi aparatur untuk meningkatkan profesionalisme, Meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dalam pelayanan pendapatan daerah, Meningkatkan sarana prasarana kerja. Membuat laporan-laporan yang transparan dan akuntabel.
2. Kendala pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017 adalah 1. kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak serta minimnya pengetahuan masyarakat manfaat membayar pajak sehingga enggan untuk membayar pajak. 2. Ketidaksetabilan pendapatan redistribusi daerah . 3. Terjadinya penurunan pada Lain-lain Pendapatan yang Sah.
3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD berdampak terhadap intensitas pembangunan daerah, apabila pembangunan dalam suatu daerah itu baik, maka kebutuhan masyarakat serana prasarana

yang dibutuhkan oleh masyarakat akan terpenuhi, seperti akses jalan, penyediaan sarana pendidikan, akses pelayanan kesehatan dan seluruh penyediaan fasilitas umum yang akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat disitulah kesejahteraan masyarakat akan lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas ditemukan beberapa permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan sebuah program-program yang telah ditetapkan, karena setiap program belum tentu bisa berjalan semaksimal mungkin, seharusnya pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta perekonomian di Kabupaten Bondowoso, karena hal ini sangat mendongkrak terhadap nilai Pendapatan Asli Daerah serta kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah harus mengoptimalkan segala hal dalam mengatasi sebuah kendala-kendala yang dihadapi.
3. Pendapatan Asli Daerah sangat memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu peran pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta perekonomian sangatlah dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso.

BIODATA PENULIS



Nama : Zainudin
NIM : 083144030
Tanggal Lahir : 06-Desember-1996
Alamat : Dsn. Durin RT/RW. 06/02 Ds. Gadingsari Kec. Binakal
Kab. Bondowoso
Prodi : Ekonomi Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : IAIN Jember
Riwayat Pendidikan : 1. TK ANA PRASA Binakal Bondowoso
2. SDN Gadingsari Binakal Bondowoso
3. MTs. Negeri 02 Bondowoso
4. MAN Bondowoso
5. IAIN Jember

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*, Yogyakarta: Graya Ilmu.
- Anggota IKAPI. 2008. *Undang-Undang Otonomi Daerah*, Bandung: fokusmedia.
- Basrowi. 2008. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali*, Bandung: CV Penerbit J-ART.
- Eko, Sutoro. 2006. *Kesejahteraan Rakyat Melalui Rute Desentralisasi*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Fauzi, Muhammad. 2016. *Kontribusi Restribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bondowoso*, Jember: IAIN Jember.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Salemba Empat.
- Hartati, Neneng. 2015. *Pengantar Perpajakan*, Bandung: Pustaka Setia.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andioffset.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: ANDI.
- Mardikanto, Totok. 1998 *Pemberdayaan Masyarakat Sejahtera*, Jakarta: PT Aldi raya.
- Maryati. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat*, Padang: UNP.
- Miles dan Hubberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-press, 1992.
- Moh Nazir. 2014. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mubarok, Afthon Ilham. 2017. *Analisi Kinerja Keuangan Daerah Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bondowoso tahun 2012-2016*, Jember: IAIN Jember.
- Muchtarmandala, Aburizal Bakrie. 1997. *Pembangunan Ekonomi Nasional Suatu Pendekatan Pemerataan, ke Adilan Ekonomi Masyarakat*, JAKARTA: PT Intermedia.
- Mulyana, Deddy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Rosdakarya.

- Munir, Misbahul. 2017. Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember, Jember: IAIN Jember.
- Prakoso, Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Restribusi daerah*, Yogyakarta: UII Press.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: bsli pustaka.
- Raharjo, 2002. *Transfarmasi Kesejahteraan*, Jakarta: Alfabeta.
- Rahmasari. 2015. *Analisis Kontribusi Restribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar*, Blitar: Universitas Islam Blitar.
- Riduan. 2010. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung: ALFABETA.
- Rochim, Abd. 2005. *Barometer Keuangan Negara/Daerah*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Setu Setiawan, *Perpajakan Indonesia*, (Malang: UMM Press. 2009), 293
- Siahaan, Marihot Pahala. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rochman. 2007. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Bandung : Eresco.
- Suharto Babun, 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Stain Jember Press.
- Sugianto, *Pajak dan Restribusi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 63.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuanlitatif, Kualitatif, dan R&D*, (bandung: alfabeta, 2016). 137-140
- Sutedi, Andrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Tangkilisan, Hassel Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*, Jakarta: Grasindo.
- Undang-undang Otonomi Daerah. 2012. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo persada.

Yulis Kharuniawati. 2017. Peranan pemerintahan Desa dalam meningkatkan Perolehan Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Umbulsari, Jember: IAIN Jember.

<http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/potensi/district/13-kabupaten-bondowoso>. Di akses: 14:15 15 Mei 2018

<http://www.go.id/33.pdf&ved>.diakses:03-April-2018,14:38.

<https://jatim.bps.go.id>. Di akses 17-Mei-2018, 13:20

<https://kbbi.web.id> diakses pada 10 April 2018, 22:36

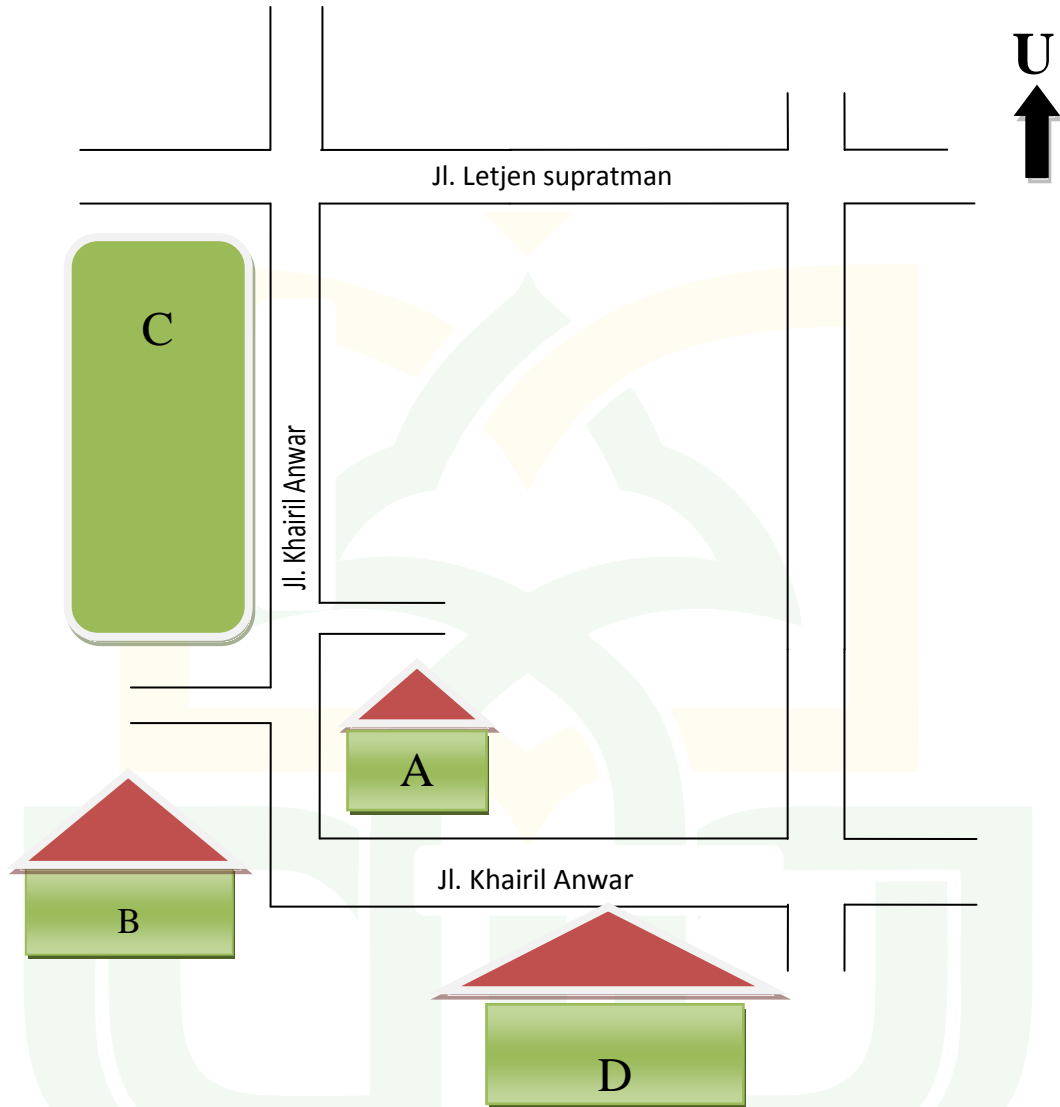
www.djpk.kemnkeu.go.id/?p=5412 diakses pada 09 April 2018, 10.30



DENAH LOKASI PENELITIAN

BADAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (BAPENDA)

KABUPATEN BONDOWOSO



Keterangan :

- A. Kantor BAPENDA
- B. MAN Bondowoso
- C. Stadion Magenda
- D. RSUD Bondowoso

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



1. Kepala BAPENDA Bondowoso



2. Sekretaris BAPENDA Bondowoso



3. Kasubag BAPENDA Bondowoso

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zainudin
Nim : 083144030
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul **"Analisis Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017"** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 10 Agustus 2018
Saya yang menyatakan



Zainudin
NIM. 083144030

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
<p>“Analisis Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017”.</p>	<p>1. Pendapatan Asli Daerah</p> <p>2. Kesejahteraan masyarakat</p>	<p>a. Pajak daerah</p> <p>b. Restribusi daerah</p> <p>c. Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan</p> <p>d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah</p> <p>a. Jumlah dan pemerataan pendapatan.</p> <p>b. Pendidikan yang semakin mudah untuk dijangkau.</p> <p>c. Kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.</p>	<p>a. Primer</p> <p>1. Pimpinan BAPENDA</p> <p>2. Karyawan BAPENDA</p> <p>b. Sekunder</p> <p>1. Dokumentasi</p> <p>2. Kepustakaan</p> <p>3. Internet</p>	<p>1. Pendekatan dan Jenis penelitian: Kualitatif Deskriptif dan studi lapangan</p> <p>2. Lokasi penelitian: BAPENDA Kab. Bondowoso</p> <p>3. Subyek penelitian: purposive</p> <p>4. Teknik pengumpulan data</p> <p>a) Observasi</p> <p>b) Wawancara</p> <p>c) Dokumentasi</p> <p>5. Metode analisis: Kualitatif Deskriptif</p> <p>6. Keapsahan data: Trianggulasi sumber</p>	<p>1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017?</p> <p>2. Apa hambatan pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017?</p> <p>3. Bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?</p>

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso ?
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso ?
3. Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso ?
4. Tugas dan wewenang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso ?
5. Apasaja sektor PAD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017 ?
6. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017 ?
7. Upaya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kedepannya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017 supaya lebih baik lagi.?
8. Bagaimana kontribusi PAD Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2017 dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?



Nomor : B- /In.20/7.a/PP.00.9/ /2018
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : Kepala BAKESBANGPOL Kabupaten Bondowoso

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir perkuliahan sekaligus guna penyelesaian skripsi maka, kami Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Zainudin

NIM : 083144030

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan : Ekonomi Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

No Telpun : 085230847453

Dosen Pembimbing : Siti Masrohatin, S.E., MM.

NIP : 19780612 200912 2 001

Judul Penelitian : Analisa Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk

Memberikan Sumbangsihnya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bondowoso. Tahun 2013-2017

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kejasamanya disampaikan terimakasih.

Wassaiamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 30 April 2018

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Abdul Rokhm, S.Ag., M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. LP2M IAIN Jember
3. Arsip